

# Analisis CSIS

## Menerobos Lingkaran Involusi Politik di Indonesia

### ANALISIS PERISTIWA

- ❑ *Tinjauan Perkembangan Politik:*
  - Pemilu 2009 Menyisakan Masalah
- ❑ *Tinjauan Perkembangan Ekonomi:*
  - Rigiditas Suku Bunga Bank
- ❑ *Tinjauan Perkembangan Regional dan Global:*
  - Terorisme, Perkembangan Politik di Myanmar dan Pemilu di Tiga Negara

### ARTIKEL

- ❑ Menerobos Lingkaran Involusi Politik di Indonesia: Refleksi Pilpres 2009
- ❑ Pola Partisipasi Politik dalam Era Reformasi
- ❑ Melayani Kepentingan Parpol: Fragmentasi dan Akuntabilitas Perumusan Kebijakan di Daerah
- ❑ Polri, Pemda dan Polmas
- ❑ Kebangkitan dan Peran Strategis China dalam Kerja Sama Asia Timur: Perspektif Indonesia
- ❑ Pembentukan Badan Hak Asasi Manusia ASEAN: Kemajuan Bagi ASEAN ?



CENTRE FOR  
STRATEGIC  
AND  
INTERNATIONAL  
STUDIES

# Analisis CSIS

Vol. 38, No. 3, September 2009

ISSN 1829-5908

## DAFTAR ISI

### PENGANTAR REDAKSI

304 – 308

### ANALISIS PERISTIWA

- ❑ *Tinjauan Perkembangan Politik:*
  - **Pemilu 2009 Menyisakan Masalah**  
*Arief Priyadi* 309 – 339
- ❑ *Tinjauan Perkembangan Ekonomi:*
  - **Rigiditas Suku Bunga Bank**  
*Pande Radja Silalahi* 340 – 351
- ❑ *Tinjauan Perkembangan Regional dan Global:*
  - **Terorisme, Perkembangan Politik di Myanmar dan Pemilu di Tiga Negara**  
*Alexandra Retno Wulan* 352 – 363

### ARTIKEL

- ❑ **Menerobos Lingkaran Involusi Politik di Indonesia: Refleksi Pilpres 2009**  
*Heru Nugroho* 364 – 374
- ❑ **Pola Partisipasi Politik dalam Era Reformasi**  
*Sunny Tanuwidjaja* 375 – 386
- ❑ **Melayani Kepentingan Parpol: Fragmentasi dan Akuntabilitas Perumusan Kebijakan di Daerah**  
*Wahyudi Kumorotomo* 387 – 419
- ❑ **Polri, Pemda dan Polmas**  
*Muradi* 420 – 441
- ❑ **Kebangkitan dan Peran Strategis China dalam Kerja Sama Asia Timur: Perspektif Indonesia**  
*Rizal Sukma* 442 – 450
- ❑ **Pembentukan Badan Hak Asasi Manusia ASEAN: Kemajuan bagi ASEAN ?**  
*Lina A. Alexandra* 451 – 470

## ARTIKEL

---

# Menerobos Lingkaran Involusi Politik di Indonesia: Refleksi Pilpres 2009

*Heru Nugroho*

*Ada tiga masalah besar yang sedang bergulir dalam kancah perpolitikan sekarang ini, yaitu kecenderungan terjadinya demokrasi beku, pluralisme semu dan hipokrisi dalam penegakkan hukum. Masalah-masalah dasar tersebut menghadang pemenang dalam pemilu presiden periode 2009-2014. Dengan kata lain, siapapun pemenangnya dalam pemilihan presiden ini, baik pasangan dari incumbent ataupun pasangan penantang, harus mampu memecahkan persoalan-persoalan tersebut, apabila ingin memperoleh legitimasi pemerintahan yang kuat di mata rakyat. Oleh karena itu, tiga problem mendasar yang harus dicarikan solusinya, yaitu para pemimpin harus membawa bangsa Indonesia keluar dari kemelut kondisi demokrasi beku melalui cara mewujudkan konsolidasi para elite politik pasca pemilu; Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus segera memecahkan perangkap kemajemukan semu dengan cara memberikan proteksi bagi minoritas yang termarginalkan; dan Presiden dan Wakil Presiden harus mengatasi perangkap hipokrisi penegakkan hukum yang menjelma dalam fenomena spiral pelanggaran hukum.*

## PENGANTAR

Tanggal 8 Juli 2009 adalah merupakan peristiwa politik bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada saat itu rakyat Indonesia berbondong-bondong ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menuangkan hak pilihnya dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Setelah momentum itu, masyarakat Indonesia akan segera memiliki kepala pemerintahan yang baru dari hasil pertarungan antara tiga pasangan kandidat calon presiden - calon wakil presiden (capres-cawapres) Megawati - Prabowo, Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono dan Jusuf Kalla - Wiranto. Siapapun yang terpilih dan menjadi peme-

nantinya wajib mengemban dan mengimplementasikan amanat rakyat atas harapan untuk merumuskan dan melaksanakan berbagai kebijakan publik dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih baik dari keadaan sekarang, atau bahkan mewujudkan cita-cita seperti yang tertuang dalam ideologi Pancasila.

Melalui politik representasi dari masing-masing kandidat dalam kampanye pemilihan langsung presiden (pilpres), harapan-harapan rakyat tersebut ditampilkan dalam kemasan iklan-iklan politik, baik dalam bentuk pencitraan program-program, yargon-yargon maupun yang cenderung demagog. Contoh-contoh yang dapat kita lihat diantaranya pasangan Megawati-Prabowo yang merepresentasi kepentingan *wong cilik* dengan menyelenggarakan pidato kampanye di dekat tempat pembuangan sampah Bantar Gebang agar mendapat kesan pro rakyat. Selain itu, dalam putaran akhir kampanyenya, mereka dan tim sukses membuat tujuh seri iklan politik dengan tema Bangkrut, Mencintai, Harga, Pekerjaan, Persatuan, Maju. Adapun seri iklan tersebut, cenderung menyerang *incumbent* (SBY), meski empat iklan politik diantaranya terhambat ditayangkan karena beberapa stasiun televisi tidak mau menayangkan.

Sementara itu, iklan-iklan politik SBY-Boediono dengan yargon "Lanjutkan!" mengklaim telah sukses menjalankan roda pemerintahan sehingga yang diperlukan adalah kalau mereka terpilih akan berupaya memacu lebih cepat target-target pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, penurunan kemiskinan, dan sebagainya. Sedang iklan-iklan politik JK-Wiranto cenderung menonjolkan spirit "lebih cepat lebih baik" terutama untuk menyindir kelemahan pasangan *incumbent* yang dianggap tidak tegas dan lambat dalam menjalankan roda pemerintahan.

Persoalan yang akan muncul kemudian adalah apakah pasangan capres dan cawapres yang keluar sebagai pemenang secara langsung merepresentasikan kepentingan rakyat sehingga dapat dianggap akan menjadi pemimpin bangsa masa depan? Apakah pemilu 2009 yang ditandai dengan tingginya belanja iklan politik di berbagai media akan melahirkan pemimpin pemerintahan yang akan membawa keluar bangsa Indonesia dari berbagai persoalan yang menderanya selama ini?

Tentu saja tidak secara otomatis demikian, karena kemungkinan distorsi politik citra melalui media yang dilekatkan oleh masing-masing pasangan seperti “kultus Bung karno” bagi Mega-Pro, “kesantunan/kehati-hatian” dari SBY–Boediono dan “keterbukaan, keberanian dan kecepatan” dari JK–Wiranto, cenderung berpotensi mempengaruhi kesadaran para pemilih. Media sangat dimungkinkan menciptakan sebuah realitas berlebihan, yang kadang-kadang jauh dari kenyataan. Oleh karena itu yang diperlukan adalah instrumen-instrumen untuk mengukur bagaimana seharusnya kiprah presiden Indonesia di masa mendatang agar bangsa ini menjadi lebih baik dalam berbagai sektor kehidupannya.

Ukuran-ukuran untuk dapat disebut sebagai pemimpin bangsa harapan rakyat Indonesia, salah satunya adalah tetap menjaga spirit reformasi yang bergulir mulai 1998 sejak kejatuhan pemerintahan otoriter dibawah rezim Orde Baru (Orba). Ada banyak hal yang harus direalisasikan cita-cita reformasi tersebut namun beberapa diantaranya, yang paling mendasar adalah menjaga keberlanjutan proses demokrasi yang substansial, mewujudkan semangat multi-kultural yang berlandaskan keadilan dan merealisasi penegakan hukum yang sebenar-benarnya. Tanpa tegaknya tiga pilar tersebut sangat dimungkinkan program-program yang telah diusung oleh masing-masing pasangan seperti pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, pemberdayaan masyarakat, dan sebagainya tidak akan banyak dinikmati oleh rakyat kecil, akan tetapi sangat potensial menghasilkan negasi-negasi, seperti lahirnya fenomena disparitas sosial, marginalisasi kaum lemah, hilangnya akses si miskin terhadap kekuasaan dan sebagainya di tengah merebaknya globalisasi, ekspansi pasar dan memudarnya batas kebudayaan masing-masing negara. Lantas, apakah realitas politik kita sedang menuju terwujudnya pemimpin masa depan harapan bangsa yang mengejar target-target tersebut?

## **ANCAMAN DEMOKRASI BEKU**

Demokratisasi yang sudah berjalan, semenjak reformasi politik digulirkan sudah berusia satu dekade lebih dan harus diakui telah

menghasilkan beberapa kemajuan di berbagai bidang kehidupan di tanah air. Capaian yang paling monumental hingga saat ini adalah terselenggaranya pemilu legislatif bersifat langsung pada tahun 1999 yang kemudian menjadi titik awal bagi era bangkitnya multi partai. Pada masa sebelumnya, rezim Orba hanya membatasi jumlah partai hanya tiga, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Pada tahun 2004 juga terselenggara pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung (artinya, langsung dipilih oleh rakyat dengan sistem *one man one vote*) dan sejak tahun 2005 hingga sekarang telah terselenggara ratusan kali pemilihan langsung kepala daerah Gubernur (Pilkada Gubernur), wali kota dan bupati di berbagai pemerintah daerah di tanah air. Demokrasi prosedural dalam bentuk penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung dari pilpres hingga pemilihan Bupati (Pilbup) telah menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia ini setelah Amerika Serikat dan India. Demokratisasi yang terus bergulir ini memiliki dampak positif mendorong meningkatnya partisipasi warga dalam kehidupan politik, terbangunnya regulasi tata kelembagaan, independensi penyelenggaraan pemilu, penjaminan hak sipil dan politik, penguatan isu-isu perempuan, terwujudnya kebebasan pers, otonomi daerah, desentralisasi, dan pemberdayaan politik.

Ironisnya, demokrasi prosedural yang sedang berlangsung kadang-kadang tidak disertai dengan terbentuknya demokrasi dalam pengertian yang substansial. Bahkan demokrasi yang sedang berproses di berbagai jenjang kehidupan dan sektor-sektor politik berada di bawah bayang-bayang terwujudnya demokrasi beku (*frozen democracy*). Fenomena ini secara kasat mata ditandai dengan munculnya suatu fase, yang dinamakan involusi atau kemandegan (Sorensen, 2007). Berbagai kelembagaan politik dibangun seperti kemajemukan partai, aturan hukum, gerakan politik yang menjamur, partisipasi warga yang meningkat, dan sebagainya, namun kehidupan ekonomi dan keadilan sosial hampir tidak beranjak dari kondisi sebelumnya. Atau bukti-bukti lainnya, meliputi pemilu langsung yang telah terselenggara dengan biaya yang cukup besar dari jenjang Pilpres hingga Pilkada tidak secara otomatis menghasilkan kebijakan-

kebijakan publik yang memihak kepada rakyat kecil. Demokrasi tidak menghasilkan perbaikan kehidupan yang berarti bagi rakyat miskin yang paling bawah. Sehingga dapat dikatakan bahwa demokrasi yang berjalan hingga saat ini digunakan sebagai instrumen politik (*political means*) untuk mencapai tujuan seperti kebebasan, keadilan dan kesejahteraan sosial masih sekedar menjadi cita-cita.

Politik uang masih merebak di segala tingkatan pada Pemilu. Kita dengan mudah menjumpai politik uang dalam segala bentuknya, baik dalam bentuk pemberian sembako, bantuan materi hingga pemberian uang mulai dari pemilihan presiden hingga pemilihan lurah. Akibatnya, mereka para calon yang dapat maju ke pemilu sebagai calon pemimpin hanya terbatas dari kalangan yang memiliki sumber dana ekonomi yang besar. Ada kecenderungan bahwa mereka yang dapat menjadi kandidat dalam berbagai jenjang pemilu bukan karena kapasitas dan kapabilitasnya sebagai politisi yang mengakar dan memahami atau merepresentasikan aspirasi rakyat. Akan tetapi karena memiliki uang maka dapat mereka dapat menjadi kandidat. Contoh lain adalah, misalnya seorang mantan preman yang kaya dengan memiliki 'bisnis gelap' dapat terpilih menjadi pemimpin, bekas penjarah hutan bisa terpilih menjadi bupati, bekas cukong bisnis gelap bisa terpilih menjadi anggota legislatif, dan sebagainya.

Selain itu, fenomena oligarki partai yang dipicu oleh kepentingan-kepentingan para elite menghasilkan calon-calon pemimpin yang bukan pilihan rakyat, akan tetapi mereka yang punya uang dan memiliki relasi kolusif dengan elite-elite partai. Gejala politik oligarki partai ini hingga saat ini merebak sehingga tidak mengherankan kalau anak, istri, kerabat atau kawan dari para elite yang dapat maju menjadi kandidat. Bahkan dalam penentuan kandidat dari suatu partai sering juga diwarnai *like and dislike* dari elite-elitenya. Maka tidak mengherankan kalau para pemimpin yang telah terpilih tidak akan merepresentasikan kepentingan rakyat (*speaking of*) tetapi malah cenderung melakukan politik representasi terhadap kepentingan rakyat (*speaking for*) dalam rangka mengembalikan modal ekonomi yang telah diinvestasikan selama masa pemilu (Guha dan Spivak, 1988).

Sementara itu, masa kampanye merupakan saat dimana para kandidat menginvestasikan, baik modal sosial, budaya maupun

modal ekonomi agar mereka memiliki kekuatan dalam perebutan posisi politik (Jenkins, 2002). Logikanya adalah semakin banyak para kandidat menginvestasikan modal sosial, budaya dan ekonomi dalam kampanye maka akan semakin banyak modal politik yang diperolehnya dan ini merupakan pintu masuk untuk merebut kekuasaan politik. Modal-modal yang diinvestasikan tersebut kemudian diekspos oleh media sehingga akan memperkuat pencitraan mereka terutama di ruang media.

Tidak mengherankan kalau mereka dalam masa-masa kampanye, seorang kandidat mengunjungi tokoh-tokoh seperti kyai, ulama, pemuka agama, dan sebagainya, untuk langsung terjun ke masyarakat agar memperoleh simpati publik di tingkat akar rumput. Belanja iklan di media tentu saja dilakukan dengan biaya yang sangat tinggi, meskipun juga disertai dengan membeli ruang di media agar segala aktivitas dalam kampanye mendukung proses pencitraan politik para kandidat. Apapun yang dilakukan oleh para kandidat, otonomi pemilih (Ien Ang, 2004) juga harus diperhitungkan. Para pemilih bukan semata-mata kumpulan subyek yang dengan mudah dapat direkayasa, akan tetapi memiliki kekuatan kritis yang bisa menentukan pilihannya terhadap kandidat secara independen.

## BAYANGAN PLURALISME SEMU

Yargon “Bhineka Tunggal Ika” yang mengakui kemajemukan tetap dibayang-bayangi paradigma *nation state* yang mengintrodusir politik monokultur. Hal itu tercermin dari semangat Sumpah Pemuda yang menegaskan bahwa Indonesia adalah merupakan sebuah kesatuan, yakni satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Bahkan meskipun semangatnya adalah kemajemukan, namun masing-masing rezim yang memerintah negeri ini memiliki tafsir sendiri-sendiri atas kebhinekaan. Ada fase dimana praktek-praktek monokultur menjelma menjadi kebijakan resmi pemerintah.

Contoh konkretnya adalah ketika rezim Orde Lama menggelar Politik Benteng dan rezim Orde Baru berupaya mendefinisikan tentang apa itu “kebudayaan nasional”. Politik Benteng merupakan kebijakan untuk membatasi ruang gerak China hanya sampai di ibu



kota kabupaten dalam upaya melindungi usaha ekonomi pribumi di pedesaan. Agar perekonomian pribumi tidak tergusur oleh etnis China maka ruang gerak dalam berekonomi etnis ini harus dibatasi. Sementara itu di tangan rezim Orba karena kebudayaan nasional diartikan sebagai "puncak kebudayaan" maka kebudayaan-kebudayaan lokal dianggap sebagai subordinatnya. Kondisi seperti ini jelas bukan mencerminkan multikultur sejati karena telah mendiskreditkan minoritas dan cenderung mengkonstruksikan oposisi biner antara budaya "pinggiran" dan "pusat" atau sering ditegaskan antara "kebudayaan nasional" dan "kebudayaan daerah".

Tonggak dimulainya politik kemajemukan di tanah air adalah ketika Gus Dur berkuasa sebagai presiden Indonesia mencabut Inpres No. 14/1967. Inpres itu berisi tentang pembatasan ritual keagamaan dan berbagai ritual kebudayaan China yang dampaknya juga membatasi hak sosial, ekonomi dan politik mereka. Selanjutnya, dengan dikeluarkannya Keppres No. 19/2002 oleh presiden Megawati tentang hari libur nasional Imlek maka etnis China bisa merayakan ritual Imlek, seperti etnis-etnis atau penganut-penganut kepercayaan lain dalam merayakan ritual keagamaannya.

Dengan kata lain hak sosial, budaya, politik dan ekonomi etnis China setara dengan etnis-etnis lain yang berdomisili di tanah air ini. Namun ketika semangat multikultur terus menggema di Indonesia, pemerintahan SBY dihadapkan pada soal besar yang belum selesai, yaitu diskriminasi terhadap kaum Muslimin penganut aliran Ahmadiyah. Bahkan para penganut Ahmadiyah mendapat perlakuan tidak adil dengan melarang secara paksa dan tindak kekerasan terhadap kaum minoritas dalam Islam tersebut. Ini merupakan tragedi politik dan merupakan sebuah ironi politik multikultur, karena pada satu sisi memberi kebebasan melakukan ritual keagamaan terhadap etnis China tetapi gagal memberi perlindungan dan kebebasan mengekspresikan kepercayaan bagi penganut Ahmadiyah. Apapun argumen yang melandasi pelarangan secara sepihak bagi praktek Ahmadiyah tersebut, aspek keadilan cenderung diabaikan dalam politik multikultur kita saat ini. Bahkan kasus ini tidak selesai karena pemerintahan SBY cenderung mengambang.

Kalau praktek-praktek seperti itu dibiarkan menggantung maka bisa jadi saat ini kita sedang terjebak dalam fenomena *pseudo multiculturalism*. Ini merupakan sebuah fenomena yang ditandai dengan sekedar mengekspresikan keyakinan, meritualkan tradisi dan merayakan perbedaan, tetapi sebetulnya kita sedang menjauh dari esensi multikulturisme itu sendiri yang seharusnya yang berbasis keadilan. Dalam politik multikultur, keadilan merupakan prasyarat mutlak yang harus dipenuhi dan ditegakkan oleh negara. Ada tiga aspek yang menjadi penopang keadilan ini yaitu rekognisi, redistribusi (penguasaan sumber-sumber ekonomi) dan representasi (Fraser,2003).

Maka tidak mengherankan kalau ritual Imlek di klenteng-klenteng yang ditandai dengan membagi-membagi angpao oleh etnis China kepada pribumi justru merupakan legitimasi peneguhan bagi posisi kelas dominan terhadap etnis subordinatnya. Dapat disebutkan bahwa fenomena ini sedang merepresentasikan minoritas etnis yang menguasai mayoritas sumber daya ekonomi. Politik kemajemukan budaya tanpa mempertimbangkan aspek pengakuan terhadap keberadaan satu etnis, redistribusi sumber-sumber ekonomi yang merata bagi etnis-etnis yang ada dan representasi dalam kebijakan pemerintah yang hakiki sama artinya dengan mengingkari keadilan dan cenderung terjebak ke dalam perangkap multikulturalisme yang semu. Secara normatif kita mengusung sistem nilai dan politik multikultur, tetapi secara praktik kita mengingkari dengan cara membiarkan diskriminasi.

## HIPOKRISI PENEGAKAN HUKUM

Penegakan hukum pasca reformasi merupakan faktor yang paling penting dalam menjaga gerak dan arah demokrasi menuju bentuk yang substansial. Tanpa tegaknya sistem hukum di tanah air demokratisasi yang telah bergulir satu dekade ini hanya akan memiliki kecenderungan melahirkan deviasi-deviasi baru seperti anarkisme, kekerasan massa dan ketidakpastian yang ujung-ujungnya rakyat akan menjadi korban utamanya. Namun, yang perlu diakui semua pihak adalah bahwa demokratisasi yang sedang bergulir dan menggema di

seantero tanah air saat ini telah membuat warga masyarakat dapat mengekspresikan, mengartikulasikan berbagai kepentingan dan kehendak politiknya, baik secara individual maupun kolektif.

Namun, kadangkala artikulasi kepentingan yang dilakukan oleh massa sering tidak terkontrol, sehingga sering mengarah pada hadirnya tindakan-tindakan anarkisme massa, kekerasan komunal dan perlawanan dengan kekerasan yang ujung-ujungnya merupakan perilaku melawan hukum. Contoh-contoh konkret dari hal tersebut diantaranya, berbagai tuntutan buruh, resistensi masyarakat terhadap berbagai proyek pemerintah, tuntutan mahasiswa, dan sebagainya seringkali tidak mengindahkan *rule of the game* dan *rule of law* sehingga memunculkan tindakan pembangkangan oleh masyarakat luas, kekerasan sipil atau bahkan brutalisme massa.

Selain itu, maraknya tindak penyalahgunaan kekuasaan oleh jajaran eksekutif (penyalahgunaan wewenang), legislatif (korupsi dengan cara menjual kewenangan), dan yudikatif (mafia peradilan), merupakan indikator-indikator penyimpangan terhadap hukum dan menunjukkan belum adanya penghayatan dan toleransi oleh elite-elite penguasa terhadap penderitaan rakyat, sehingga mengancam proses demokrasi itu sendiri. Meskipun pemerintahan SBY telah berupaya mengatasi masalah korupsi di jajaran penguasa tersebut namun hasilnya masih jauh dari harapan, dan banyak pihak menganggap pelaksanaannya belum maksimal. Taring penegakan hukum yang mengandalkan kiprah KPK masih harus menempuh jalan berliku dan sebagian orang melihatnya sebagai fenomena "tebang pilih".

Kalau kita simak secara lebih mendalam berbagai produk perundangan yang dikeluarkan pasca reformasi sebenarnya sudah banyak yang dilandasi oleh spirit demokrasi, tetapi tidak jarang pelaksanaannya jauh dari gambaran normatif, atau bahkan sebaliknya. Ibarat kita semua sedang membuat undang-undang tetapi untuk tidak ditaati, atau ada kecenderungan ramai-ramai dilanggar. Berbagai rangkaian pelanggaran menghasilkan bentuk peniruan pelanggaran-pelanggaran yang lain. Atau ini merupakan efek imitasi sehingga mendorong munculnya gejala "spiral pelanggaran hukum" yang tak berujung pangkal karena berlangsung secara terus menerus dan tidak tahu kapan mulainya dan kapan harus diakhiri.

Kalau fenomena-fenomena seperti itu tidak bisa diatasi maka sebenarnya kita sedang masuk dalam kerangkeng hipokrisi penegakan hukum. Suatu kondisi kemunafikan dalam penegakan hukum karena dengan kasat mata pada satu sisi berbicara, membuat dan menegakan aturan yang secara normatif benar tetapi pada sisi yang lain pelanggaran dan pengingkaran terhadap norma hukum, sedemikian maraknya yang dilakukan di hampir semua jenjang dan jajaran politik. Jangan-jangan hipokrisi ini memang berakar pada perilaku budaya kita yang memang munafik.

Banyak pengamat cenderung mengatakan demikian, karena kenyataannya kita seolah-olah sedang mengusung nilai gotong royong, kerukunan, tolong-menolong tetapi kenyataannya jiwa egoisme menjadi norma yang dominan dalam bertindak, kita sering menyatakan mempromosikan kemanusiaan tetapi dalam kenyataan justru melakukan pelanggaran HAM di mana-mana, mengaku majemuk tetapi memaksakan kehendak dan bersikap diskriminatif terhadap minoritas, atau kita sering dengan bangga menyebut dirinya seorang Pancasilais tetapi brutal dan menegasikan aturan main dalam berpolitik.

## PENUTUP

Ada tiga masalah besar yang sedang bergulir dalam kancah perpolitikan kita seperti telah disebutkan di atas, yaitu adanya kecenderungan terjadinya demokrasi beku, pluralisme semu dan hipokrisi dalam penegakan hukum. Masalah-masalah tersebut menghadang pemenang dalam pemilu presiden periode 2009-2014. Dengan kata lain, siapapun pemenangnya, baik pasangan *incumbent* ataupun pasangan penantang, harus mampu memecahkan persoalan-persoalan tersebut apabila ingin memperoleh legitimasi pemerintahan yang kuat di mata rakyat.

Oleh karena itu, apabila diformulasikan ada tiga problem mendasar yang harus dicarikan solusinya. *Pertama*, para pemimpin harus membawa bangsa Indonesia keluar dari kemelut kondisi demokrasi beku melalui cara mewujudkan konsolidasi para elite politik pasca pemilu. Pengalaman yang lalu menunjukkan bahwa

pasca pemilu elite-elite politik sulit konsolidasi dan kondisi seperti ini, sangat mengganggu jalannya program-program pembangunan pemerintah. Elite-elite politik yang dapat terkonsolidasi dengan difasilitasi kepemimpinan yang terpilih akan cenderung mengurangi resiko destabilisasi sosial sehingga kondisi seperti itu dapat menjadi fondasi bagi realisasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

*Kedua*, Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih harus segera memecahkan perangkat kemajemukan semu dengan cara memberikan proteksi bagi minoritas yang termarginalkan. Minoritas yang dimaksud disini bisa berupa etnis, kelompok sosial, penganut agama, kelas, dan sebagainya. Proteksi ini dilakukan dalam upaya mewujudkan pengakuan eksistensi, redistribusi sumber ekonomi dan representasi kepentingan agar mereka kaum minoritas juga memiliki jaminan keadilan di republik ini. *Ketiga*, Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus mengatasi perangkat hipokrisi penegakan hukum yang menjelma dalam fenomena "spiral pelanggaran hukum". Fenomena itu harus dipatahkan melalui sistem kepemimpinan yang tegas, pemberian ganjaran yang memadai bagi yang mengikuti aturan hukum dan sanksi yang seberat-beratnya bagi yang terbukti melanggar. Apabila ketiga hal itu dapat direalisasikan maka Presiden dan Wakil Presiden layak disebut sebagai pemimpin harapan bangsa Indonesia.

## KEPUSTAKAAN

- Ang, Ien. 2004. "Globalisasi, Komunikasi dan Ketidakpastian" dalam Heru Nugroho, *Menumbuhkan Ide-ide Kritis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fraser, Nancy. 2003. *The Radical Imagination: Between Redistribution and Recognition*.
- Jenkins, Richard. 2002. *Pierre Bourdieu*. Routledge.
- Sorensen, George. 2007. *Democracy And Democratization: Process And Prospects In A Changing World*. Westview Press.
- Guha, Ranajit and Gayatri Spivak (editors). 1988. *Selected Subaltern Studies*. Oxford University Press.